
Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pandangan Kewarganegaraan

Akmal Arsalan^{a,1*}, Sugiyanto^{b,2}

^{ab}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang

¹akmalarsalan551@gmail.com ; ²dosen01992@unpam.ac.id

Naskah diterima: 27-09-2025, direvisi: 10-03-2026, disetujui: 30-03-2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kebijakan ketenagakerjaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai menimbulkan dampak terhadap persepsi warga negara, khususnya mahasiswa. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja memengaruhi pandangan kewarganegaraan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh regulasi tersebut terhadap cara mahasiswa memahami hak, kewajiban, dan peran mereka sebagai warga negara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan melibatkan mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Pamulang angkatan 2024 sebagai responden. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket, data yang diperoleh melalui angket tersebut kemudian dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Undang-Undang Cipta Kerja dan pandangan kewarganegaraan mahasiswa. Temuan ini menegaskan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran kritis terhadap kebijakan publik. Simpulan dari penelitian ini adalah regulasi negara berperan dalam membentuk cara pandang warga negara muda. Disarankan agar kurikulum pendidikan tinggi lebih responsif terhadap isu-isu aktual agar mahasiswa mampu bersikap reflektif dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Kata-kata kunci: Undang-Undang Cipta Kerja; kewarganegaraan; mahasiswa; kebijakan publik; pendidikan kewarganegaraan

Abstract

This study was motivated by the dynamics of labor policy as outlined in the Job Creation Law, which is considered to have an impact on the perceptions of citizens, particularly students. The issue raised is the extent to which the Job Creation Law influences students' views on citizenship. The purpose of this study is to determine the influence of these regulations on how students understand their rights, obligations, and roles as citizens. This study uses a quantitative approach with an associative method and involves students from the 2024 batch of the Civic Education Study Program at Pamulang University as respondents. The data collection technique in this study used a questionnaire, and the data obtained through the questionnaire was then analyzed statistically. The results of the study show that there is a significant influence between the Job Creation Law and students' views on citizenship. These findings emphasize the importance of citizenship education in shaping critical awareness of public policy. The conclusion of this study is that state regulations play a role in shaping the views of young citizens. It is recommended that higher education curricula be more responsive to current issues so that students are able to be reflective and responsible as citizens.

Keywords: Job creation law; citizenship; students; public policy; civic education

Pendahuluan

Pekerjaan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia sekaligus bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2), ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi dalam relasi ketenagakerjaan. Dalam realitas sosial, kebijakan ketenagakerjaan berperan penting dalam membentuk struktur kesejahteraan dan stabilitas sosial suatu bangsa. Oleh karena itu, intervensi negara dalam membentuk regulasi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja menjadi sangat krusial dalam menjaga kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya merespons tantangan globalisasi dan keterbukaan investasi, Pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini disusun melalui metode Omnibus Law dengan tujuan menyederhanakan regulasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, regulasi ini menimbulkan kontroversi luas di tengah masyarakat. Beberapa substansi dalam undang-undang tersebut, seperti penghapusan upah minimum sektoral, fleksibilitas hubungan kerja, pengurangan hak pesangon, dan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi fokus kritik karena dinilai merugikan buruh dan menguntungkan pemodal (Zubi, Herawati, & Rachman, 2021).

Kebijakan publik dalam bentuk perundang-undangan seharusnya mencerminkan keadilan sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional. Dalam perspektif kewarganegaraan, Seluruh warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara serta kesempatan yang adil dalam mengakses kesejahteraan. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis terhadap dinamika kebijakan publik, termasuk kebijakan ketenagakerjaan. Mahasiswa, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menjadi kelompok yang strategis untuk dikaji karena mereka memiliki dasar keilmuan dalam memahami hukum, hak asasi manusia, dan sistem ketatanegaraan. Mereka diharapkan tidak hanya memahami teori kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga mampu mengkritisi dan menilai implikasi sosial dari kebijakan publik yang berlaku.

Menurut Winarno (2013), kewarganegaraan tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga mencakup kesadaran, sikap, dan keterlibatan langsung seseorang dalam dinamika sosial maupun aktivitas politik. Mahasiswa sebagai warga negara intelektual diharapkan memiliki civic knowledge (pengetahuan), civic disposition (sikap), dan civic skills (keterampilan kewarganegaraan) seperti yang dikemukakan Kardiman (2014). Dalam konteks UU Cipta Kerja, mahasiswa PPKn perlu memaknai regulasi tersebut tidak hanya dari sisi substansi hukum, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek dari UU Cipta Kerja. Hermawan dan Setiawan (2023) menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak negatif terhadap pesangon dan perlindungan hak-hak pekerja di sektor industri elektronik. Sementara itu, Wongkaren dan Tim (2022) menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan alih daya dan PKWT dalam praktik ketenagakerjaan. Elvlyn dan Marhaen (2022) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peningkatan efisiensi dalam sektor UMKM, regulasi ini cenderung menekan hak-hak buruh. Meski demikian, sebagian besar kajian berfokus pada dampak ekonomi dan hukum dari UU Cipta Kerja, sementara pengaruhnya terhadap aspek kewarganegaraan,

khususnya persepsi mahasiswa, masih jarang diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang menyoroti bagaimana mahasiswa sebagai kelompok akademik memahami, menilai, dan merespons UU Cipta Kerja dalam kerangka kewarganegaraan.

Penelitian ini secara khusus dibatasi pada mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Pamulang angkatan 2024. Pemilihan populasi ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterkaitan materi kuliah mereka dengan isu-isu kebijakan publik, hukum ketenagakerjaan, dan pendidikan kewarganegaraan. Pembatasan ini bertujuan agar fokus penelitian tetap terjaga pada kelompok yang memiliki kompetensi dan relevansi terhadap objek kajian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis hubungan asosiatif, guna menguji sejauh mana pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pandangan kewarganegaraan mahasiswa yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan.

Sementara itu, perumusan masalah dalam studi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pandangan kewarganegaraan mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Pamulang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diajukan dengan hipotesis: H_a (alternatif) terdapat pengaruh yang signifikan antara Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pandangan kewarganegaraan mahasiswa PPKn; dan H_0 (nol) — tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris apakah Undang-Undang Cipta Kerja berpengaruh terhadap perspektif mahasiswa PPKn dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana pandangan mereka terhadap peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana dalam studi kewarganegaraan kritis dengan mengaitkan antara kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mempertegas pemahaman tentang kewarganegaraan yang tidak sekadar berlandaskan aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial yang berkembang. Selain itu, secara aplikatif, studi ini dapat dijadikan acuan oleh kalangan akademisi, tenaga pendidik, serta pembuat kebijakan dalam merancang kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang relevan dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam proses formulasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pamulang, dengan lokasi utama berada di lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang memiliki karakteristik akademik sejalan dengan isu kewarganegaraan dan kebijakan publik. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama semester genap tahun akademik 2024/2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan fokus utama dari penelitian ini, yakni guna mengetahui adanya pengaruh antara Undang-Undang Cipta Kerja sebagai variabel bebas terhadap pandangan kewarganegaraan



mahasiswa sebagai variabel terikat (Sugiyono, 2018; Emzir, 2020). Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian hipotesis secara statistik dan penyajian data secara objektif dalam bentuk angka, sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih terukur dan dapat digeneralisasikan dalam batas tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Pamulang Angkatan Tahun 2024 yang berjumlah 180 orang. Kelompok ini dipilih secara sengaja (purposif) karena dianggap memiliki pengetahuan dasar yang memadai terkait wawasan kebangsaan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pemahaman terhadap perkembangan kebijakan publik. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni teknik seleksi responden berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Sampel penelitian berjumlah 85 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pertimbangan tersebut antara lain bahwa mahasiswa yang menjadi sampel telah menempuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan memiliki akses terhadap isu-isu aktual termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, baik melalui media massa maupun diskusi kelas.

Pengumpulan data dilakukan melalui angket tertutup yang disusun berdasarkan indikator pada masing-masing variabel. Instrumen angket memuat pernyataan-pernyataan yang mencerminkan persepsi mahasiswa terhadap substansi Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pandangan mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Angket menggunakan skala Likert lima tingkat guna mengetahui sejauh mana responden menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diberikan. Sebelum disebarkan secara luas, instrumen ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya pada kelompok kecil responden untuk memastikan bahwa butir-butir pernyataan relevan dan konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud (Arikunto, 2019). Penyebaran angket dilakukan secara langsung kepada mahasiswa yang telah ditentukan sebagai sampel.

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta pola jawaban pada masing-masing variabel. Untuk menguji adanya pengaruh antara variabel independen dan dependen, digunakan metode regresi linear sederhana. Proses analisis ini didukung oleh software SPSS versi 25, yang memudahkan peneliti dalam menilai hubungan linier serta mengukur tingkat signifikansi statistik (Widiyanto, 2020). Sebelum dilakukan analisis utama, data terlebih dahulu diuji melalui uji prasyarat seperti normalitas dan linearitas guna memastikan validitas dan kelayakan data. Dengan metode ini, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menunjukkan hubungan sebab-akibat secara terbatas antara dua variabel yang diteliti.

Melalui pendekatan metodologis yang sistematis dan terukur ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat dan relevan mengenai bagaimana kebijakan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat membentuk pandangan kewarganegaraan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Taufiqurrohmah, Subkhi, & Yuliana (2021), bahwa pendekatan kuantitatif sangat bermanfaat dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memahami perubahan sikap warga negara dalam konteks perubahan kebijakan publik. Pendekatan ini juga memperkuat posisi mahasiswa sebagai subjek strategis dalam merespons dinamika sosial-politik yang berkembang di tengah masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 Hasil Coefficients

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	18.784	3.956		4.748	.000
	UU Cipta Kerja	.695	.067	.752	10.401	.000

a. Dependent Variable: Pandangan Kewarganegaraan

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap perspektif kewarganegaraan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang angkatan 2024. Hal ini dibuktikan melalui uji regresi yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis alternatif yang menyatakan adanya pengaruh positif antara Undang-Undang Cipta Kerja dan pandangan kewarganegaraan mahasiswa dinyatakan valid, sementara hipotesis nol ditolak. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa perubahan kebijakan di sektor ketenagakerjaan turut memengaruhi cara mahasiswa memaknai hak, kewajiban, serta peran mereka sebagai warga negara dalam konteks sosial dan politik.

Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah dalam penelitian, bahwa regulasi besar seperti Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya menjadi kebijakan administratif negara, tetapi juga memiliki daya dorong terhadap kesadaran warga negara, terutama di kalangan terdidik. Mahasiswa Program Studi PPKn, sebagai representasi warga negara intelektual, menunjukkan bahwa mereka mampu memahami isi kebijakan secara substantif, serta menilai dampaknya dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar pekerja. Pandangan kewarganegaraan yang terbentuk tidak hanya berbasis pada pengetahuan hukum formal, melainkan juga pada pemahaman kritis terhadap kondisi sosial masyarakat.

Temuan ini selaras dengan konsep civic disposition yang dikemukakan oleh Torney-Purta et al. (2015), yang menekankan pentingnya sikap kritis warga negara dalam menyikapi isu-isu publik. Mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan seperti buruh dan pekerja informal. Mereka menilai bahwa keberadaan UU Cipta Kerja dalam beberapa aspek lebih berpihak pada kepentingan investor dan pelaku usaha, sementara posisi pekerja semakin dilemahkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Zubi, Herawati, dan Rachman (2021), yang menemukan bahwa regulasi ini memperkuat relasi industrial yang cenderung subordinatif terhadap pekerja.

Lebih lanjut, hasil ini juga mengonfirmasi penelitian Elvlyn dan Marhaen (2022), yang menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja membuka peluang efisiensi ekonomi dan digitalisasi sektor UMKM, namun kebijakan ini justru memunculkan ketimpangan relasi kerja. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, temuan ini menegaskan pentingnya integrasi isu-isu kebijakan publik ke dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, terutama dalam mata kuliah yang berfokus pada hukum, HAM, dan partisipasi warga negara. Mahasiswa PPKn yang memiliki kerangka teoritik tentang kewarganegaraan lebih siap menanggapi dinamika regulasi dan mampu menilai apakah suatu kebijakan sejalan dengan prinsip keadilan sosial atau tidak.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat gagasan Marshall (dalam Winarno, 2015) yang mengemukakan bahwa konsep kewarganegaraan mencakup tiga elemen fundamental, yaitu hak-hak sipil, hak-hak politik, serta hak-hak sosial. Dalam konteks UU Cipta Kerja, pilar hak sosial menjadi



yang paling terdampak, khususnya terkait dengan hak atas pekerjaan yang layak, upah minimum, serta jaminan sosial. Mahasiswa sebagai aktor intelektual memiliki kepekaan terhadap isu ini, dan menilai bahwa negara seharusnya hadir sebagai pelindung hak-hak dasar warga, bukan semata fasilitator pasar. Temuan ini juga mendorong perlunya penguatan model kewarganegaraan kritis seperti yang ditawarkan oleh Banks (2017), yaitu model kewarganegaraan yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam menilai, mengkritisi, dan bahkan mengadvokasi perubahan kebijakan.

Implikasi dari hasil penelitian ini cukup luas. Secara akademik, temuan ini dapat menjadi pijakan pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap isu-isu kebijakan nasional. Pembelajaran tidak cukup hanya menyampaikan konsep normatif kewarganegaraan, tetapi juga harus mengajak mahasiswa untuk memahami dan menganalisis kebijakan negara yang berdampak langsung terhadap hak dan kehidupan warga. Dalam tataran praktis, temuan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan agar proses legislasi lebih demokratis dan melibatkan partisipasi publik, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa.

Meski begitu, studi ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah cakupan responden yang terbatas, yakni hanya mencakup mahasiswa dari satu program studi dan satu perguruan tinggi saja, sehingga generalisasi hasil ke populasi mahasiswa Indonesia secara keseluruhan perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, pendekatan kuantitatif yang digunakan hanya mampu menjangkau dimensi pengaruh yang bersifat numerik, dan belum mengeksplorasi secara rinci faktor-faktor subjektif yang melatarbelakangi cara pandang mahasiswa. Dengan demikian, pada penelitian mendatang dianjurkan untuk menerapkan pendekatan kualitatif atau campuran (*mixed methods*), serta memperluas populasi responden agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Secara konseptual, temuan ini mendorong pemikiran baru bahwa kewarganegaraan tidak hanya dapat dilihat dari sisi status legal dan keterlibatan dalam pemilu, tetapi juga dari cara warga negara merespons kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Di sinilah pentingnya pengembangan teori kewarganegaraan substantif, yang mengintegrasikan kesadaran kritis terhadap keadilan sosial, partisipasi aktif dalam diskursus kebijakan, serta keberanian untuk mengambil posisi dalam menghadapi ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, mahasiswa PPKn terbukti menjadi representasi warga negara kritis yang mampu menilai dan menyikapi kebijakan negara dengan cara yang reflektif serta memiliki tanggung jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan yang diperoleh dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berpengaruh signifikan terhadap pandangan kewarganegaraan mahasiswa Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang angkatan 2024. Mahasiswa sebagai warga negara terdidik menunjukkan kemampuan untuk menilai kebijakan publik, tidak hanya dari segi legalitasnya, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara. Pandangan kewarganegaraan yang terbentuk dalam diri mahasiswa tidak lagi sebatas pemahaman normatif tentang hak dan kewajiban, tetapi berkembang menjadi kesadaran kritis terhadap keberpihakan negara terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai oleh mahasiswa sebagai representasi kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan pasar dan investasi, dengan mengesampingkan perlindungan sosial terhadap pekerja, sehingga memunculkan refleksi mendalam tentang peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.



Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang tidak sekadar unggul dalam aspek kognitif, melainkan juga sensitif terhadap dinamika sosial-politik. Integrasi isu-isu aktual seperti kebijakan ketenagakerjaan ke dalam kurikulum menjadi sangat relevan agar mahasiswa dapat menilai kebijakan publik secara objektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, disarankan agar institusi pendidikan tinggi, khususnya program studi PPKn, mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berbasis isu dan partisipatif. Dengan demikian, mahasiswa dapat dilatih untuk menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan kritis serta mengembangkan keberanian moral dalam menyampaikan pandangan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan rasa kemanusiaan. Serta pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan persepsi dan aspirasi kalangan akademisi serta masyarakat sipil secara luas dalam proses legislasi agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai demokratis dan keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Banks, J. A. (2017). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). London: SAGE Publications.
- Elvlyn, N., & Marhaen, D. (2022). Dampak regulasi cipta kerja terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55–68.
- Emzir. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermawan, R., & Setiawan, A. (2023). *Implikasi UU Cipta Kerja terhadap pesangon pekerja sektor industri elektronik*. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 9(2), 22–35.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurrohman, A., Subkhi, I., & Yuliana, Y. (2021). *Model Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Teori Marshall di Era Globalisasi*. *Jurnal Demokrasi dan PKN*, 12(1), 33–45.
- Torney-Purta, J., Barber, C., & Wilkenfeld, B. (2015). *Students' Civic Knowledge, Attitudes, and Engagement: The Impact of Civic Education Programs*. International Civic and Citizenship Education Study (ICCS).
- Widiyanto, W. (2020). *Analisis Data dengan SPSS: Teori dan Praktik dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Winarno, S. (2015). *Kewarganegaraan dalam Perspektif Sosiologis dan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wongkaren, T. S., & Tim. (2022). *Analisa implementasi UU Cipta Kerja klaster PKWT dan alih daya*. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 8(1), 41–52.
- Zubi, M., Herawati, S., & Rachman, A. (2021). *Perubahan perlindungan pekerja dalam UU Cipta Kerja*. *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, 7(1), 73–85.